

Daftar Pustaka

Daftar Buku

- Brotoharjo, R. Santoso. 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Ctk. Keempat, Refika Aditama, Bandung,
- Effendi, Muhammad Bakhrun. 2006, *Kebijakan Perpajakan Di Indonesia*, Alinea Pustaka, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi 1986, *Kamus Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2002, Jakarta, Balai Pustaka.
- Kansil, C.S.T. 1979, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Ctk. Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, ANDI, Yogyakarta
- Nurmanto, Safri. 2003, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta,
- Prakosa, Kesit Bambang. 2006, *Hukum Pajak*, edisi pertama, Ekonisia, Yogyakarta.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005, *Perpajakan : Teori dan Aplikasi*, Depok, Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Grafindo Persada.
- Soemantoro, Rochmat. 1992, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung, PT. Eresco.
- Suandy, Erly 2011, *Hukum Pajak*, Yogyakarta, Salemba Empat.
- Sukardji, Untung. 2006, *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta, Sinar Grafika

Daftar Website

Kukuh Bhimo Nugroho, “ Sudah Rugi Tertimpa Pajak Pula”
<https://tirto.id/20160314-35/sudah-rugi-tertimpa-pajak-pula-35415> diakses
pada tanggal 17 Juni 2016

No Name “Implikasi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 70 Tahun 2013
terhadap Petani Kelapa Sawit”
[http://www.pajak.go.id/content/article/implikasi-putusan-mahkamah-
agung-ri-nomor-70-tahun-2013-terhadap-petani-kelapa-sawit](http://www.pajak.go.id/content/article/implikasi-putusan-mahkamah-agung-ri-nomor-70-tahun-2013-terhadap-petani-kelapa-sawit) diakses pada
tanggal 30 Juni 2016

No Name “Kementan Ajukan Keberatan Terkait Ppn 10% Produk Pertanian”
<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/41324> diakses pada tanggal 30
Juni 2016

Zainal Arifin Mochtar, *Panorama Teori Hukum dan Keadilan*, terdapat dalam
<http://dokumen.tips/documents/panorama-teori-hukum-dan-keadilan.html>
.ppt, diakses pada tanggal 25 Feb. 16

Daftar Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.42 tahun 2009. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 4, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5492)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5750)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 tahun 2014 tentang *judicial review* Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE – 24/PJ/2014 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 Mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Hasil Pertanian yang Dihasilkan dari Kegiatan Usaha di Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007.